

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA SEKTOR PARIWISATA BUDAYA DALAM PENGELOLAAN MUSEUM KEBUDAYAAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

¹Nabila Putri Prasundari

²Antik Bintari

³Aditya Candra Lesmana

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

²Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

³Departemen Sosiologi, Universitas Padjadjaran

¹Email Korespondensi: nabila18022@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This research is entitled "The Role of Local Governments in Managing the Cultural Tourism Sector in Administrative City of West Jakarta (Study on the Management of Cultural Museums)". This research is motivated by a decrease in number of visitors on cultural museums in West Jakarta and the condition of museum facilities that still require attention. Therefore, researchers want to know how the role of the Regional Government in managing cultural museums in West Jakarta. This study aims to examine and describe the role of local government in managing cultural museums in West Jakarta based on coordinator, facilitator, and stimulator aspects. The method used is descriptive method through a qualitative approach, with field study as the data collection techniques (interviews, observations, documentation) combined with literature studies, and SWOT analysis. The results show that the government's role in managing cultural museums in West Jakarta isn't fully optimal, the coordinator's aspect stated that each stakeholder has a good cooperation, although information needs to be completed, the museum's human resources also needs training in term of conservation. In terms of facilitators, the government has made improvements to the environment, although it's not evenly distributed due to funding and permit constraints. Based on stimulator aspect, the local government needs to pay attention to the maintenance and provision of facilities for the convenience of visitors. The governments need to work hard to increase public interest in museums in midst of modernization. The conclusion of this study, the role of managing cultural museums in West Jakarta is not yet fully optimal, though various roles have been carried out, there are some parts that must be considered and addressed. Such as the provision of infrastructure and promotion. So, the researcher suggested to improve and maintain better facilities, adding tour guides, collaborate with influencers/Youtubers as a promotion.

Keywords: Government role, Museum Management, SWOT, West Jakarta City

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Sektor Pariwisata Budaya di Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi pada Pengelolaan Museum Kebudayaan)". Penelitian ini dilatar belakangi oleh penurunan angka kunjungan pada museum kebudayaan di Kota Jakarta

Barat serta kondisi sarana-prasarana museum yang masih memerlukan perhatian. Oleh karenanya, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengelola museum kebudayaan di Kota Administrasi Jakarta Barat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti serta mendeskripsikan peran Pemda dalam mengelola museum kebudayaan di Jakarta Barat berdasarkan aspek koordinator, fasilitator, dan stimulator. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi lapangan (wawancara, observasi, dokumentasi) dan studi pustaka, serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengelola museum kebudayaan di Jakarta Barat belum sepenuhnya optimal, berdasarkan aspek koordinator disebutkan tiap *stakeholder* sudah memiliki kerjasama yang baik meski informasi perlu dilengkapi, SDM museum juga masih memerlukan pelatihan di bidang konservasi. Pada aspek fasilitator, pemerintah sudah melakukan perbaikan lingkungan meski belum merata karena kendala dana dan izin. Dan berdasarkan aspek stimulator, Pemda perlu memperhatikan perawatan dan pengadaan fasilitas demi kenyamanan pengunjung. Pemda perlu bekerja keras untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap museum di tengah modernisasi. Kesimpulan dari penelitian ini, peran pengelolaan museum kebudayaan di Jakarta Barat belum sepenuhnya optimal, karena meski sudah dilakukan berbagai peranan masih ada bagian yang harus diperhatikan dan dibenahi. Seperti penyediaan sarana prasarana dan promosi. Maka, saran yang dapat diajukan adalah perbaikan serta perawatan fasilitas yang lebih baik, penambahan pemandu wisata, serta bekerjasama dengan *influencer/Youtuber* sebagai media promosi museum.

Kata Kunci: Kota Jakarta Barat, Pengelolaan Museum, Peran Pemerintah, SWOT

PENDAHULUAN

Indonesia berkaitan erat dengan sektor pariwisata, mengingat banyaknya daerah-daerah ataupun destinasi yang dapat dikunjungi. Potensi yang dimiliki Indonesia apabila dikelola dengan baik dapat menarik investor yang nantinya berdampak kepada meningkatnya kegiatan perekonomian. Sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Kepariwisata adalah kegiatan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Oleh sebab itu, segala aspek yang

berkenaan dengan pariwisata adalah suatu bentuk kerjasama daripada berbagai pihak. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat berbagai jenis obyek wisata, mulai dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan, Ibukota Indonesia yakni Jakarta juga kaya akan budaya khususnya budaya betawi yang merupakan suku dari para penduduk asli. Salah satu kota di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki banyak wisata budaya ialah Kota Jakarta Barat, berdasarkan kepemilikannya Jakarta Barat memiliki Kota Tua, Museum Fatahillah, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, dan Museum Tekstil. Termasuk kepada cagar budaya (Chinatown, Toko Merah, Gereja Sion, Masjid Raya dan Langgar Tinggi, Jembatan Kota Intan) dan

ada pula wisata yang dimiliki oleh pihak swasta, Akan tetapi, dari banyak museum dan wisata budaya yang ada di Jakarta, terdapat beberapa kekurangan yang amat disayangkan. Permasalahan yang menjadi perhatian salah satunya adalah mengenai kebersihan dan perawatan. Revitalisasi dan perbaikan memang sudah dilakukan beberapa kali, namun beberapa faktor nampaknya membuat museum kebudayaan di Jakarta Barat masih memiliki beberapa kekurangan.

Tabel 1 Jumlah Kunjungan di Museum Kebudayaan Jakarta Barat Tahun 2017

No	Nama Museum	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Museum Sejarah Jakarta	798.139	812.265	741.487
2	Museum Wayang	381.106	372.648	322.046
3	Museum Tekstil	36.202	41.710	36.202
4	Museum Seni Rupa dan Keramik	206.495	190.469	188.030

Sumber: BPS Jakarta dan Jakarta Open Data

Selain permasalahan mengenai sarana dan prasarana, sebagaimana termuat pada Tabel 1 terdapat ketidakstabilan dengan terjadi kenaikan dan penurunan angka kunjungan di setiap tahunnya, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut, yang berarti peranan dari pemerintah selaku stakeholder utama dalam mengelola sektor wisata budaya khususnya pada museum kebudayaan di Jakarta Barat harus dikaji lebih dalam lagi. Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2009: 213), Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku

individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Soekanto juga menambahkan bahwa peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). (Soekanto, 2009: 213) Sedang Ryaas Rasyid menjelaskan secara spesifik tentang peran pemerintah bahwa Tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. (Rasyid, 2000:59)

Peran pemerintah dianggap sebagai satu hal yang amat krusial dalam pengembangan sektor pariwisata, mulai dari revitalisasi, dan perbaikan, lalu penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan pengunjung, serta pemanfaatan sumber daya dan tenaga. Hal ini sejalan dengan pengertian pengelolaan, disebutkan oleh G.R Terry, bahwa Pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (Hartono, 2016:26) Selanjutnya, pemerintah memiliki peran untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder lain hingga melakukan promosi ke daerah maupun negara lain. Menurut Blakely dalam buku Otonomi dan Pembangunan Daerah mengemukakan peran pemerintah daerah dapat mencakup peran-

peran koordinator, fasilitator dan stimulator, yaitu:

- a. Koordinator, yakni pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Lebih jauh lagi, peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran, dan jumlah perusahaan. Dapat juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah, badan usaha, dan kelompok masyarakat lain untuk menyusun tujuan, perencanaan, dan strategi ekonomi. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan dimana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya. Pendekatan regional biasanya lebih efektif karena perhatian pemerintah daerah dapat terpusat pada perekonomian daerah dan hal tersebut juga dapat menciptakan pengelolaan daerah yang lebih baik dan hasil kerja sama antara pemerintah yang lebih tinggi dengan pemerintah daerah.
- b. Fasilitator, dimana pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Kelompok masyarakat yang berbeda dapat membawa kepentingan yang berbeda dalam proses penentuan kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah tersedianya

satu tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat terfokus dalam memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya. Adanya tujuan yang jelas juga memberikan dasar berpijak untuk penentuan program-program tambahan yang lain.

- c. Stimulator, merupakan peran dimana pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha untuk masuk, misalnya dengan menyediakan bangunan-bangunan yang dapat disewa untuk menjalankan usaha dengan potongan biaya sewa pada beberapa tahun pertama. Dalam bidang kepariwisataan, pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu. (Kuncoro, 2004: 113-114)

Ditinjau dari aspek koordinator, pemerintah daerah diperlukan untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi maupun stakeholder lain, pemerintah juga berperan untuk menetapkan kebijakan dan strategi demi kemajuan sektor wisata budaya. Sedang pada aspek fasilitator, pemerintah berperan dalam melakukan pembangunan dan perbaikan pada museum maupun lingkungan di sekitar museum. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimiliki. Lalu melalui aspek stimulator pemerintah memiliki peran untuk menstimulasi stakeholder lain agar memiliki ketertarikan pada museum dengan melakukan promosi dan pengadaan fasilitas yang memadai. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan reaksi masyarakat dan pendanaan yang menjadi pilar penting dalam

berkembangnya museum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam mengelola museum kebudayaan di Kota Jakarta Barat, kemudian untuk mengetahui indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada proses peranan dalam pengelolaan tersebut sekaligus untuk mencari upaya alternatif yang harus dilakukan terhadap hasil dari analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam peran pemerintah mengelola sektor pariwisata budaya di Jakarta Barat.

METODE

Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah Daerah dalam mengelola sektor pariwisata budaya di Kota Administrasi Jakarta Barat khususnya pada pengelolaan museum kebudayaan. Maka untuk mencapai tujuan yang juga rumusan yang telah dituliskan sebelumnya, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif digunakan karena sifatnya yang memberikan deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena maupun keadaan yang tengah diteliti. Yang mana, keabsahan atau validitas akan didapat setelah peneliti berhasil menggambarkan atau menjabarkan secara mendalam hal-hal yang dijadikan fokus permasalahan. Pada penelitian deskriptif, objek yang diteliti segala aspeknya berjalan alamiah, tanpa ditambah-tambahkan atau diatur terlebih dahulu. Mulai dari observasi sampai kepada wawancara dengan pihak-pihak terkait. Semua hal yang berkaitan, diteliti sebagaimana kenyataan yang berjalan sehingga bisa dideskripsikan kemudian ditelaah sebagai sebuah problematika atau fenomena. Sedang untuk mencapai tujuan daripada penelitian ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2007:1), penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku,

fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sesuai dengan judul maupun variabel yang akan diteliti, yakni peran dari Pemerintah Daerah dalam mengelola sektor pariwisata budaya di Kota Administrasi Jakarta Barat khususnya pada pengelolaan museum kebudayaan. Selanjutnya, penulis menggunakan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan data, yakni pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi yang merupakan bagian dari studi lapangan. Sementara, teknik kedua yang akan digunakan penulis adalah studi pustaka. Keduanya, akan dikombinasikan untuk menunjang kelengkapan juga mempermudah peneliti dalam mengolah serta menggabungkan berbagai temuan yang dimiliki. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada peran pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata budaya di Kota Administrasi Jakarta Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Sektor Pariwisata Budaya Di Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Aspek Koordinator.

Aspek pertama dalam peran pemerintah menurut Blakely adalah aspek Koordinator. Dimana pemerintah dapat bertindak sebagai pihak yang menetapkan kebijakan atau mengupayakan berbagai strategi yang berkaitan dengan pembangunan di daerahnya. Dalam hal ini sebagaimana fungsi regulating (pengaturan) dan posisi pemerintah sebagai stakeholder utama, pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk memajukan museum kebudayaan dengan kebijakan serta strategi yang tepat. Tujuan khusus dalam pengelolaan sektor pariwisata budaya khususnya museum dibuat untuk memajukan serta melestarikan peninggalan bersejarah yang ada di dalam

masing-masing museum tersebut, tujuan itu ada agar keberadaan museum tetap memiliki posisi di tengah-tengah masyarakat. Dengan tujuan khusus untuk membangun kebudayaan Jakarta dengan multikulturalisme, mengembangkan sumberdaya kebudayaan berkualitas dan melestarikan sejarah serta warisan budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melalui RENSTRA Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 berupaya untuk mencapainya dengan membuat beberapa strategi dan kebijakan secara umum mengenai hal berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pelatihan SDM bagi pelaku seni budaya di tingkat sanggar seni maupun komunitas seni budaya, juga memastikan Gedung pertunjukan seni budaya yang berkelas dunia.
2. Memastikan program dan kegiatan urusan kebudayaan yang bersesuaian dan tepat sasaran, termasuk kepada peningkatan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni budaya. Selain itu juga dibuat kebijakan untuk meningkatkan jumlah ruang pelatihan seni budaya tingkat kecamatan sekaligus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelatihan
3. Memberikan akses seluas-luasnya bagi para pelaku seni/seniman terlebih mengenai ketersediaan ruang terbuka untuk pertunjukan seni budaya
4. Melakukan inventarisasi warisan budaya tak benda (WBTB) melalui teknologi informasi sekaligus memberikan apresiasi kepada masyarakat terhadap pelestarian budaya WBTB .
5. Mempermudah SOP Rekomendasi Konservasi dan registrasi Cagar Budaya
6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui usulan langsung penyediaan kelengkapan sarana seni budaya yang kemudian dilanjutkan

dengan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana terhadap pelayanan masyarakat

7. Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan pengembangan kebijakan urusan kebudayaan, dimana di waktu bersamaan juga dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penatausahaan serta pelayanan kantor termasuk kepada laporan keuangan yang efektif dan akuntabel

Dari arah kebijakan dan strategi khusus yang dituliskan di dalam RENSTRA dapat ditafsirkan bahwa dalam mengelola unsur kebudayaan daerah seperti; cagar budaya, museum, pengembangan kebudayaan, dan kesenian tradisional, Pemerintah Daerah menginginkan adanya kolaborasi dengan teknologi, pembinaan dan pelatihan pada SDM terkait, menyediakan lahan ataupun ruang bagi para pelaku seni untuk melakukan pertunjukan, pelestarian cagar budaya, serta mewujudkan program-program yang tepat sasaran dan diminati oleh masyarakat. Selaras dengan tujuan khusus yang telah dibuat, hal ini selanjutnya dikaitkan dengan bagaimana masing-masing instansi melakukan pengelolaan kepada museum kebudayaan khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini Pemerintah Daerah termasuk kepada Dinas Kebudayaan, Unit Pengelola, dan Satuan Pelayanan Museum. Berkaitan dengan strategi dan kebijakan pertama yakni pembinaan dan pelatihan pada SDM, Kepala Bidang Perlindungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa: “kami akan melakukan pelatihan atau sertifikasi kepada SDM pengelola museum, program ini dilaksanakan langsung oleh dinas selaku induk dari berbagai museum. Upaya pembinaan kepada pengelola museum dua

tahun ini (2020-2021) masih dilakukan secara online, namun masih berharap adanya kesempatan untuk melakukan secara offline demi efektivitas pelatihan disertai praktek konservasi koleksi.” Pelatihan atau sertifikasi ini merupakan sebuah upaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dari para pegawai atau staf museum, dimana kegiatan yang ada di dalamnya berkaitan dengan pengenalan koleksi, pembelajaran mengenai museum, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan serta kecakapan. Sedang strategi dan kebijakan lain, pengelola museum kebudayaan di Kota Jakarta Barat mewujudkannya dengan membuat berbagai program yang berkaitan dengan digitalisasi atau pemanfaatan teknologi informasi berupa pengadaan tiket menggunakan kartu Jaklingko, penyediaan informasi melalui media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Youtube*, pengadaan program berbasis teknologi, dan lain sebagainya. Sedang berkaitan dengan pelestarian budaya, museum-museum kebudayaan dan Dinas Kebudayaan melakukan berbagai upaya perawatan pada koleksi dan bangunan yang dimiliki agar nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Lalu dalam mewujudkan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya untuk menarik minat masyarakat. Dinas Kebudayaan bersama Unit Pengelola dan Satuan Pelayanan Museum mencoba untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan yang dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti *Night at Museum*, kunjungan melalui AR dan VR, atraksi teatrikal di Museum Sejarah Jakarta, *Workshop* membuat dan Tie Dye di Museum Tekstil, *Museum goes to school* dari Museum Seni Rupa dan Keramik, hingga pagelaran

wayang dan *workshop* membuat wayang oleh Museum Wayang. Aspek koordinator juga tidak terlepas dari bentuk kerjasama yang tercipta antar masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan museum kebudayaan, dimana *Stakeholder* merupakan pihak-pihak yang bertanggungjawab akan suatu hal, termasuk kepada pengambilan keputusan dan implementasi di kehidupan. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Unit Pengelola, dan Satuan Pelayanan Museum saling bekerjasama dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Pemerintah Kota, museum yang berada di luar negeri, WNI di luar negeri, komunitas, akademisi, pelajar, bahkan dinas lain di luar konteks kebudayaan sekalipun. Dinas Kebudayaan menyebutkan bahwa masing-masing museum memiliki komunitas yang diajak bekerjasama, seperti Sahabat Museum, Pemerhati Budaya dan Museum Indonesia, Forum Museolog Indonesia, Komunitas Jelajah Budaya pada Museum Sejarah Jakarta, Komunitas Pelukis Indonesia dengan Museum Seni Rupa dan Keramik, Komunitas Ciliwung Condet dengan Museum Tekstil, hingga Persatuan Perdalangan Indonesia dengan Museum Wayang. Salah satu museum yakni Museum Sejarah memiliki acara rutin yang berkenaan dengan museum daerah lain, kedutaan besar, bahkan WNI yang tinggal di negara lain. Pemerintah Daerah juga mengajak pelajar khususnya SMK Pariwisata untuk belajar mengenai museum dan pemandu wisata, hingga akademisi yang berkaitan dengan sejarah dan arkeologi untuk mengkaji koleksi yang ada di museum. Kebijakan dan strategi yang disusun oleh Pemerintah Daerah sampai hari ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, meskipun pada beberapa bagian masih ada kekurangan yang perlu dilengkapi seperti

halnya informasi. Masing-masing pemegang kuasa pada pengelolaan museum juga memiliki kerjasama yang cukup baik dengan berbagai pihak, mulai dari komunitas hingga akademisi. Namun dalam internal Dinas maupun pengelola museum sendiri, belum banyak tenaga yang cakap terlebih di bidang konservasi sehingga masih perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Sektor Pariwisata Budaya Di Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Aspek Fasilitator

Berkaitan dengan fasilitator, pemerintah memiliki peran yang meliputi proses pembangunan, perbaikan perilaku, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Selain itu pemerintah juga memerlukan tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat terfokus dalam memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 149 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Yang salah satu fungsinya sebagai pelaksanaan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pada urusan kebudayaan. Dalam pengelolaan museum sebagai bentuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, Dinas Kebudayaan menyebutkan bahwa: “untuk perbaikan biasanya hanya dilakukan untuk bagian-bagian kecil, karena museum berkaitan dengan BCB (Bangunan Cagar Budaya) sehingga harus melalui proses yang cukup panjang. Saat ini hanya ada proses renovasi pada beberapa museum. Seperti pengecatan ulang pada tembok-tembok atau furnitur yang rusak.” Sebab museum kebudayaan menempati bangunan yang merupakan peninggalan bersejarah, maka

proses pembangunan maupun perbaikannya tidak bisa dilakukan sesuka hati. Ada proses panjang yang harus dijalani sebelum diputuskan untuk melakukan perbaikan ataupun pembangunan tertentu.

Saat ini, hanya ada pembangunan kecil yang tidak merubah bentuk atau bagian bangunan. Meskipun belum ada pembangunan pada bangunan museum, saat ini lingkungan di sekitar Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang dan Museum Seni Rupa dan keramik yakni Kota Tua tengah terdapat pembangunan dengan skala cukup besar. Seperti dijelaskan oleh Kasatpel Museum Seni Rupa dan Keramik bahwa: “pembangunan yang berjalan saat ini bukan ada di museum melainkan di wilayah sekitar museum yakni Kota Tua. Adanya pembentukan pusat transportasi demi akses yang lebih mudah dari berbagai daerah dan moda transportasi” Pembangunan ini merupakan program Pemerintah Provinsi untuk untuk mengadakan moda transportasi terintegrasi agar Kota Tua bisa semakin hidup. Selain itu, pemerintah berupaya mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki dengan melebarkan trotoar dan melakukan revitalisasi jalur pedestrian di wilayah Kota Tua termasuk bagian depan Museum Seni Rupa dan Keramik.

Berkaitan dengan perawatan koleksi, Kepala Bidang Pelindungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa: “untuk perawatan atau konservasi, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan PKCB (Pusat Konservasi Cagar Budaya), selain itu ada juga tenaga ahli dari berbagai instansi, ahli antropologi, tenaga profesional konservator. Contoh untuk menangani koleksi dari bahan batu, akan dicari konservator yang sesuai dengan koleksi tersebut salah satunya diambil dari laboratorium Borobudur. Ahli yang tidak dimiliki oleh pihak dinas maupun PKCB akan direkrut, diundang, atau bahasanya disewa dengan honor untuk dapat mengkaji tentang koleksi tersebut.” Dalam hal ini PKCB sebagai instansi dengan lisensi khusus untuk melakukan konservasi terhadap

benda-benda bersejarah memiliki hak dan kewajiban dalam merawat, memperbaiki, hingga meregistrasi koleksi yang rusak di museum. PKCB sebagai instansi dengan lisensi khusus untuk melakukan konservasi terhadap benda-benda bersejarah memiliki hak dan kewajiban dalam merawat, memperbaiki, hingga meregistrasi koleksi yang rusak di museum. Saat ini terdapat 6486 koleksi di Museum Sejarah Jakarta, 12447 koleksi di Museum Seni Rupa dan Keramik, 2683 koleksi di Museum Tekstil, dan 6863 koleksi di Museum Wayang yang masing-masing memiliki sumber yang beragam. Mulai dari hibah, hingga pengadaan dengan anggaran museum. Dinas Kebudayaan juga melakukan pemanfaatan sumber daya melalui pemberdayaan masyarakat salah satunya program Duta Museum yang nantinya akan berperan sebagai pemandu dan promosi museum.

Perbaikan lingkungan baik di bagian dalam gedung maupun lingkungan sekitar gedung sudah dilakukan oleh pemerintah meski belum merata karena terkendala alokasi dana dan proses yang cukup rumit, perbaikan pada lingkungan Kota Tua juga menjadi sebuah aksi dari pemerintah sebagai upaya meningkatkan minat masyarakat untuk datang berkunjung. Selain itu, peningkatan kualitas SDM yang bertanggung jawab atas museum juga sudah dilaksanakan demi informasi dan edukasi yang lebih bisa tersampaikan. Tak lupa, berkenaan dengan perawatan koleksi sebagai pilar utama pengelolaan museum kebudayaan, pembagian tanggung jawabnya sudah jelas dan tidak mengalami tumpang tindih. Sehingga pada proses konservasi bisa terencana dan lebih efektif.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Sektor Pariwisata Budaya Di Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Aspek Stimulator

Menurut Blakely, peran pemerintah berdasarkan aspek stimulator yakni Pemerintah Daerah dapat menstimulasi

penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Dalam pengelolaan museum kebudayaan, hal ini ditafsirkan sebagai sebuah upaya promosi agar museum tetap eksis di era modern seperti sekarang ini. Dimana promosi merupakan sebuah upaya untuk memberikan informasi, menyebarluaskan, memengaruhi dan mengajak masyarakat untuk mengunjungi sebuah tempat atau membeli produk tertentu. Dinas Kebudayaan melakukan promosi tentang museum maupun kegiatan yang akan dan tengah berlangsung melalui berbagai media, menyesuaikan dengan era modern dimana menggunakan media sosial adalah media paling efektif dalam menyebarkan informasi. Karena hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan sosial media dalam kehidupan sehari-hari, maka penyebarannya bisa lebih cepat dan lebih luas. Selain itu, adanya *influencer* sebagai tokoh idola yang kehidupan sehari-harinya menjadi sorotan bagi masyarakat membuat sesuatu yang dipromosikannya bisa secara langsung tersampaikan pada pengikutnya di media sosial. Sedang Museum Sejarah Jakarta, menggunakan media *podcast* untuk mempromosikan kegiatan mereka. Kerjasama dengan media massa seperti televisi ataupun portal-portal berita tidak diprogramkan secara khusus, melainkan museum seringkali menjadi objek dari program yang mereka miliki. Sehingga, tanpa dipinta pun mereka akan datang untuk meliput. Bentuk promosi seperti ini juga berlaku pada Museum Tekstil dan Museum Wayang, dimana media massa memiliki hak untuk melakukan liputan disesuaikan dengan esensi dari acara ataupun rubrik di media tersebut.

Lalu Blakely juga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menyediakan berbagai macam fasilitas untuk menarik pengusaha untuk masuk. Artinya, pemerintah perlu menyiapkan fasilitas untuk

menunjang berbagai kebutuhan pengunjung museum. Fasilitas merupakan bagian penting dari museum itu sendiri, karena fasilitas lah yang dapat mendukung adanya kemudahan, kenyamanan dan rasa aman bagi para pengunjung saat melakukan kunjungan pada museum. Dalam mengadakan fasilitas umum di dalam museum, perlu pengkajian terlebih dahulu oleh tim sidang pemugaran. Karena lagi-lagi, hal ini berkaitan dengan bangunan cagar budaya sehingga tidak mudah untuk membuat sebuah ruangan atau bangunan baru di sekitarnya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh Kasatpel Museum Sejarah Jakarta, yaitu: “sejauh ini tersedia tour guide namun hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Ruang laktasi sudah ada, namun ruang kesehatan belum ada. Di museum itu kalau mau menambahkan fasilitas baru harus memikirkan ruangnya karena bangunannya tidak bisa direnovasi. Kalau mau renovasi harus izin ke tim ahli cagar budaya yang harus melalui sidang dengan proses cukup panjang. Sifatnya hanya memperbaiki, seperti menambah fasilitas untuk disabilitas (tidak merubah akan tetapi menambah dan melengkapi kebutuhan)” Fasilitas yang tersedia di Museum Sejarah Jakarta sudah cukup memadai dilihat dari ketersediaan pemandu wisata hingga fasilitas dasar seperti toilet dan ruang laktasi. Namun belum ada ruang kesehatan dan beberapa bagian museum belum ramah untuk kaum difabel.

Sedang Museum Seni Rupa dan Keramik memiliki penataan taman yang apik, lingkungan yang asri, sirkulasi udara yang cukup baik, serta kebersihan yang terjaga di tiap sudut membuat Museum Seni Rupa dan Keramik sedap dipandang mata. Fasilitas umum yang bersifat dasar seperti toilet, mushola, P3K, juga sudah lengkap. Saat melakukan observasi, peneliti juga mendapati bagaimana sulitnya akses untuk naik ke lantai dua museum dimana digunakan tangga spiral yang ukurannya cukup sempit sehingga membutuhkan kehati-hatian ketika menaikinya. Selain itu disayangkan sebab belum tersedianya pemandu wisata yang bisa

membantu memberikan penjelasan pada pengunjung, sehingga pengunjung hanya memasuki tata pameran lalu melihat-lihat koleksi yang dimiliki oleh Museum Seni Rupa dan Keramik. Meski demikian, Museum Seni Rupa dan Keramik memiliki fasilitas edukasi berupa praktik membuat gerabah yang bisa diikuti oleh pengunjung dengan harga terjangkau.

Serupa dengan Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Tekstil juga menyediakan fasilitas edukasi berupa praktek membatik dan membuat Tie Dye. Pengunjung bisa melakukan praktek membatik dengan membayar sekitar 40 ribu rupiah untuk wisatawan lokal dan 75 ribu untuk wisatawan asing, dengan bahan dan alat yang disediakan oleh Museum Tekstil. Fasilitas ini terbuka untuk umum dan dilakukan di Pendopo Batik yang terletak di bagian belakang Museum Tekstil. Namun karena pusat aktivitasnya berada di bagian belakang museum, bagian depan yang menjadi tempat museum memamerkan koleksinya terkesan sepi dan tidak berpenghuni. Tidak pula tersedia pemandu wisata yang bisa membantu menjelaskan kisah-kisah maupun sejarah dari koleksi yang dipajang di tata pameran. Salah seorang pengunjung Museum Tekstil juga mengatakan bahwa: “Sudah cukup baik tapi masih harus dilakukan berbagai pembenahan, contohnya pada toiletnya.” Artinya, masih diperlukan perawatan yang lebih baik pada fasilitas yang sudah tersedia, karena toilet merupakan fasilitas yang paling dasar namun sangat penting untuk diperhatikan higienitasnya.

Berdasarkan hasil observasi, Museum Wayang merupakan museum dengan fasilitas yang sangat lengkap dan pemandu wisata yang interaktif menyambut pengunjung di pintu masuk. Ketersediaan pemandu wisatanya juga cukup banyak sehingga bisa menemani pengunjung lalu menjelaskan berbagai koleksi yang dimiliki oleh Museum Wayang. Museum Wayang juga memiliki toilet difabel dan fasilitas berupa tangga landai yang disertai rem penahan sehingga

museum ini sangat ramah untuk kawan-kawan difabel. Namun, lagi-lagi menjadi hal yang sedikit disayangkan karena toilet yang disediakan kurang bersih dan sedikit berbau, masih membutuhkan perawatan yang lebih menyeluruh agar pengunjung yang datang bisa merasa nyaman dan aman ketika menggunakan fasilitas di museum.

Dan dalam upaya promosi hingga penyediaan fasilitas berupa program-program tambahan, reaksi masyarakat merupakan sebuah tolak ukur dalam melihat kesuksesan upaya pemerintah. Hingga saat ini, masyarakat memberikan respon dan antusiasme yang cukup baik mulai dari kunjungan hingga kehadiran pada berbagai program dan kegiatan. Berkenaan dengan pendanaan, Karena pengelolaan museum merupakan bagian dari tugas pokok Dinas Kebudayaan, maka pendanaannya dimasukkan ke dalam RAPBD sebelum diresmikan menjadi APBD. Yang berarti, segala unsur pengelolaan museum dibiayai oleh Pemerintah Provinsi melalui APBD yang sudah dirancang terlebih dahulu. Namun, pendanaan untuk pengelolaan museum juga ada yang bersumber dari DAK atau Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini berarti negara menganggarkan secara khusus APBN untuk digunakan dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan museum tertentu. Dengan sumber dana yang berasal dari APBD dan/atau APBN, upaya promosi pada berbagai media mulai dari televisi, radio, dan media-media sosial sudah dijalankan oleh Dinas Kebudayaan maupun pengelola museum. Berbagai metode promosi dilakukan demi tersebarnya informasi mengenai museum dan kegiatan yang lebih luas lagi, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan memiliki ketertarikan terhadap museum kebudayaan. Penyediaan fasilitas yang baik juga sudah diupayakan masing-masing pengelola museum, meskipun masih ada beberapa bagian yang memerlukan perhatian khusus. Berkat upaya-upaya tersebut, masyarakat menunjukkan respon yang cukup

baik dilihat dari acara-acara besutan museum yang masih diminati oleh masyarakat juga ketertarikan mereka terhadap berbagai kegiatan yang disediakan oleh pihak museum. Meskipun, museum masih harus bekerja lebih keras mengerahkan segala upaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap museum kebudayaan di tengah modernisasi yang begitu pesat.

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) Sederhana dalam Peran Pemerintah Daerah dalam Sektor Pariwisata Budaya di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) adalah teknik yang digunakan untuk merumuskan strategi berdasarkan hasil identifikasi dari faktor-faktor atau situasi yang sedang dan mungkin akan dihadapi. Pada analisis SWOT, akan dibandingkan antara faktor internal yakni kekuatan dan kelemahan, dengan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Dan analisis ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) sekaligus meminimalisir kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*).

Berikut ini tabel analisis SWOT yang disusun secara sederhana berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah dalam mengelola sektor pariwisata budaya di Kota Administrasi Jakarta Barat:

Tabel 2 Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. Modernisasi dan digitalisasi pada museum.	1. Jumlah SDM yang ahli belum memadai pada internal museum
2. Fasilitas museum sudah cukup memadai.	2. Belum tersedia pemandu wisata yang memadai
3. Museum menawarkan	3. Perawatan pada

hiburan dan edukasi	fasilitas umum yang belum maksimal
4. Kerjasama yang baik antar pihak	4. Belum tersedianya beberapa fasilitas
5. Antusiasme masyarakat yang cukup baik	5. Pembangunan atau perbaikan lingkungan
6. Pembagian tupoksi yang sudah jelas	6. Koleksi adalah hal yang sulit
7. Koleksi yang lengkap dan banyak	7. Ruang untuk menempatkan koleksi sedikit terbatas
8. Adanya pemberdayaan masyarakat	8. Promosi yang masih harus digencarkan
9. Promosi secara luas dengan media sosial dan <i>influencer</i>	9. Kurangnya lahan parkir di Kawasan Kota Tua
10. Sumber dana berasal dari APBD dan APBN	
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
1. Jakarta Barat kaya akan peninggalan bersejarah	1. Modernisasi dan globalisasi yang semakin pesat
2. Peluang museum untuk berkembang	2. Museum Tekstil berada di dekat daerah Tanah Abang yang padat
3. <i>Range</i> kerjasama yang luas hingga ke luar negeri	3. Karena wabah virus COVID-19, museum mengalami kesulitan dalam bidang pendanaan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	4. Kekhawatiran mengenai penyampaian

5. Edukasi mengenai sejarah yang menjadi kebutuhan berbagai kalangan	5. Informasi Kekhawatiran mengenai kekuatan konstruksi ketika ramai pengunjung karena gedungnya sudah tua
--	---

(Sumber: Penulis, 2022)

Upaya Alternatif dari Hasil Analisis SWOT

Dalam melakukan pengelolaan museum kebudayaan di Kota Administrasi Jakarta Barat, masing-masing *stakeholder* memiliki kekuatan, kelemahan, serta menemui peluang, dan ancaman yang perlu dihadapi. Oleh karenanya, penyusunan strategi untuk mencapai tujuan pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengikuti perkembangan zaman pada penyebaran informasi maupun pengadaan berbagai program, mengembangkan potensi museum dengan menghadirkan program-program yang semakin meningkatkan antusiasme dan ketertarikan masyarakat, menggiatkan promosi akan Kota Jakarta Barat yang memiliki banyak peninggalan bersejarah, bekerjasama untuk penyediaan ahli di bidang konservasi, kuratorial, dan koleksi dan/atau pelatihan untuk SDM yang ada di museum, mengencarkan promosi demi menarik pengunjung menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, lalu menyediakan pemandu wisata yang bisa bekerjasama dengan pihak lain seperti sekolah maupun universitas, selain itu perlu adanya upaya melengkapi, perbaikan, dan perawatan fasilitas yang lebih baik agar pengunjung lebih nyaman saat mengunjungi kekayaan sejarah yang ada di Jakarta Barat, memperbanyak pemandu wisata agar hal-hal yang berkaitan dengan museum bisa sampai

dan diterima oleh masyarakat, lalu perbaikan dilakukan dalam skala kecil terlebih dahulu, selain tidak memakan banyak biaya, bagian yang kurang apik bisa secepatnya dibenahi, serta mencoba berbagai metode promosi melalui media sosial dan melibatkan *influencer* atau artis-artis idola.

SIMPULAN

Dalam mengelola sektor pariwisata budaya khususnya museum kebudayaan di Jakarta Barat, Pemerintah Daerah yang terdiri dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Unit Pengelola Museum, dan Satuan Pelayanan Museum melakukan berbagai peranan yang berkaitan dengan berbagai aspek. Mulai dari program, kerjasama dengan *stakeholder* lain, pembangunan, perawatan koleksi, hingga promosi. Akan tetapi, upaya pengelolaan ini masih belum optimal karena masih terdapat beberapa bagian yang memerlukan perhatian lebih. Mulai dari belum tersedianya banyak tenaga yang mahir di bidang konservasi juga masih ada kekurangan yang perlu dilengkapi seperti halnya informasi. Museum juga harus lebih siap berhadapan dengan modernisasi dan globalisasi dengan menghadirkan berbagai program maupun penyediaan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, perbaikan lingkungan di dalam maupun lingkungan sekitar museum meskipun sudah dilakukan namun belum merata dan maksimal karena terkendala dana dan proses yang cukup rumit, serta peningkatan kualitas SDM Museum adalah hal krusial yang harus digiatkan oleh pihak museum. Dan pada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah masyarakat menunjukkan respon yang cukup positif terlihat dari ramainya kunjungan dan minat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan museum. Selain itu, museum juga memiliki pendanaan yang baik karena bersumber dari APBD, bahkan ada beberapa museum yang mendapat Dana Alokasi Khusus dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meski demikian, Pemerintah Daerah masih harus menggiatkan promosi demi menarik

minat lebih banyak masyarakat khususnya generasi muda, juga perawatan terhadap fasilitas umum agar pengunjung merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan kunjungan.

REFERENCES:

- Badan Pusat Statistik. 2020. Jumlah Pengunjung Museum Menurut Jenis Museum di Provinsi DKI Jakarta, 2017-2018. <https://jakarta.bps.go.id/dynamictable/2020/02/11/326/4-7-2-jumlah-pengunjung-museum-menurut-jenis-museum-di-provinsi-dki-jakarta-2017-2018> 21 April 2021
- Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Barat. 2020. *Revisi Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022*. Jakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- Hartono. 2016. *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Provinsi DKI Jakarta. 2017. Potensi Investasi Sektor Pariwisata Provinsi DKI Jakarta. <http://ptsp.jakarta.go.id/penanaman-modal/files/sector-investasi/Potensi-Investasi-Pariwisata-DKI-Jakarta.pdf>. 22 Februari 2021
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Strauss, Anselm dan Yuliet Corbin. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

ACKNOWLEDGMENT:

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Unit Pengelola Museum khususnya Museum Seni, Satuan Pelayanan Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, dan Museum Tekstil. Termasuk kepada pengunjung museum kebudayaan yang telah mendukung

dan membantu penulis dalam memberikan data maupun informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.